

# KERJASAMA UNI EROPA DENGAN ARMENIA UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN PASCA PERANG KARABAKH KEDUA

Oleh : Gris Dienta Carrifino

Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*The Second Karabakh War that occurred in 2020 between Armenia and Azerbaijan not only caused casualties and infrastructure damage to Armenia, but also caused a border crisis, a large influx of refugees from Nagorno-Karabakh, and an internal political crisis. Therefore, Armenia asked the European Union for help and support. The European Union began to play a more active role in supporting the post-conflict peace process, especially through cooperation with Armenia. The European Union Mission in Armenia (EUMA) is the basis for the EU's cooperation with Armenia to realize peace after the Second karabakh War.*

*This study adopts a Pluralism perspective and utilizes Johan Galtung's theory of peace, applying the international system level of analysis. The research method employed is qualitative, with literature study as the primary data collection technique. Data were obtained from official documents, cooperation agreements, annual EU reports, as well as scientific articles and news sources.*

*The results of the study show that the EU's cooperation with Armenia includes the European Union Mission in Armenia (EUMA) civil mission, mediation, financial and humanitarian assistance. EUMA has a mandate to observe and report on the security situation along the Armenia-Azerbaijan border through patrols; enhancing trust-building between Armenia and Azerbaijan. In addition, the EU also helps Armenia in dealing with the refugee problem by providing humanitarian and financial assistance to deal with the domestic political crisis. The results achieved from this cooperation are a significant decrease in the frequency of Azerbaijani attacks on the Armenian border area, as well as an agreement between Armenia and Azerbaijan for a peace agreement and normalization of relations between the two countries.*

**Keywords:** *European Union, Armenia, peace, European Union Mission in Armenia (EUMA).*

## PENDAHULUAN

Istilah perdamaian berasal dari kata dasar damai, yang secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *peace*. Kata *peace* diturunkan dari bahasa Anglo-Prancis *pes*, yang berasal dari bahasa Latin *pax*, yang berarti persetujuan, ketenangan, dan keselarasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), damai diartikan sebagai aman sentosa, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tenang, dan tenteram. Sementara itu, perdamaian diartikan sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan. Secara praktis, perdamaian merujuk pada kesepakatan untuk mengakhiri perang, atau suatu kondisi di mana konflik bersenjata tidak sedang berlangsung.<sup>1</sup>

Perdamaian merupakan suatu keadaan yang harmonis, bebas dari konflik, serta mengedepankan keserasian sosial dan saling pengertian. Johan Galtung membedakan dua bentuk perdamaian, yakni perdamaian negatif, yang berarti ketiadaan kekerasan atau perang terbuka; dan perdamaian positif, yakni kondisi damai yang dibangun melalui investasi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, kelembagaan, dan nilai sosial yang mendorong terwujudnya perdamaian jangka panjang.<sup>2</sup>

Dalam konteks global, Uni Eropa memiliki peran penting sebagai aktor

internasional dalam mempromosikan perdamaian melalui pendekatan diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Atas kontribusinya dalam mendorong perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia, Uni Eropa dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2012.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan Uni Eropa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 *Treaty on European Union* (TEU) dan Pasal 8 *Treaty on European Union* (TEU).

Salah satu konflik yang menarik perhatian Uni Eropa adalah Perang Karabakh Kedua yang berlangsung selama 44 hari pada tahun 2020 antara Armenia dan Azerbaijan. Konflik ini dipicu oleh insiden di Distrik Tovuz pada 12 Juli 2020. Distrik Tovuz memiliki kepentingan geostrategis bagi Azerbaijan karena terletak di persimpangan rute energi dan transportasi utama. Serangan di wilayah tersebut memicu konfrontasi besar menyebabkan protes massal dan tekanan publik terhadap pemerintah Azerbaijan untuk melanjutkan aksi militer guna merebut kembali wilayah pendudukan Nagorno-Karabakh.<sup>4</sup>

Sebagai respons, Armenia dan Azerbaijan menyatakan keadaan darurat dan mulai memobilisasi pasukan pada 27 September 2020. Azerbaijan kemudian melancarkan serangan militer untuk membebaskan wilayah yang diduduki oleh Armenia. Hingga akhir Oktober, Azerbaijan berhasil merebut kembali kendali atas empat kota dan sejumlah besar desa. Pada 9

<sup>1</sup> “Bab IV Konsep Perdamaian Perspektif Eric Weil,” *Repository Universitas Katolik Widya Mandira*, diakses 8 Mei 2025, <https://repository.unwira.ac.id/2180/5/BAB%20IV.pdf>.

<sup>2</sup> Fitri Handayani, “Perdamaian dalam Masyarakat Global,” *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 66.

<sup>3</sup> European Union, “Aims and Values,” diakses 8 Mei 2025, [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values\\_en](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_en).

<sup>4</sup> Davor Boban, “The Failure of The Nagorno-Karabakh Conflict Resolution: Shortcomings of Facilitative Mediation or an Unsuitable Mediator?,” *Croatian Political Science Review* 60, no. 2 (2023): 76.

November 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin memfasilitasi perundingan gencatan senjata trilateral yang mengkonsolidasikan kemenangan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh.<sup>5</sup>

Pada 10 November, perjanjian gencatan senjata ditandatangani oleh Presiden Azerbaijan dan Perdana Menteri Armenia, dengan mediasi dari Rusia. Perjanjian tersebut mengharuskan Armenia menarik pasukannya dari tujuh distrik yang didudukinya sejak 1994, serta menjamin keamanan jalur transportasi antara Azerbaijan dan enklavnya di Nakhchivan, yang dikenal sebagai Koridor Zangezur. Gencatan senjata ini mengakhiri kekerasan bersenjata dan mengembalikan sebagian besar wilayah pendudukan kepada Azerbaijan.<sup>6</sup>

Namun demikian, pelaksanaan perjanjian gencatan senjata ini menghadapi berbagai hambatan. Armenia memang menarik sebagian pasukannya dari wilayah Nagorno-Karabakh, tetapi bentrokan bersenjata tetap terjadi, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Azerbaijan segera mempersiapkan pembukaan koridor transportasi ke Nakhchivan, namun kedua pihak gagal menyepakati lokasi dan mekanisme operasional jalur tersebut. Ketidaksabaran Azerbaijan terhadap lambatnya implementasi oleh Armenia semakin meningkat.<sup>7</sup>

Perang Karabakh Kedua menarik perhatian komunitas internasional

terhadap konflik yang belum terselesaikan di wilayah tersebut. Berbagai negara besar, organisasi internasional dan negara tetangga, termasuk Uni Eropa, menyerukan penghentian kekerasan dan dimulainya perundingan damai. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik secara damai, Uni Eropa memandang pentingnya terlibat aktif dalam proses perdamaian di Armenia pascaperang.

Armenia dianggap memiliki nilai strategis dalam kebijakan geopolitik Uni Eropa, terutama dalam menyeimbangkan pengaruh Rusia di kawasan Kaukasus Selatan. Meskipun Armenia merupakan anggota *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) yang dipimpin Rusia, negara ini juga berupaya mempererat hubungan dengan Barat, termasuk melalui kerja sama politik dan ekonomi dengan Uni Eropa.<sup>8</sup> Sejak tahun 2020, kekecewaan Armenia terhadap peran Rusia sebagai mediator dan penjamin keamanan telah membuka peluang bagi Uni Eropa untuk meningkatkan keterlibatannya.

Seiring melemahnya peran Rusia sebagai mediator utama, Uni Eropa mulai meningkatkan kehadirannya melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan di kawasan pascakonflik. Hal ini memberikan peluang strategis bagi Uni Eropa untuk memperluas pengaruhnya di Kaukasus Selatan tanpa secara langsung menantang kepentingan Rusia.<sup>9</sup> Uni Eropa menerapkan pendekatan soft power melalui diplomasi, bantuan pembangunan, dan dukungan terhadap institusi demokratis Armenia guna memperkuat ketahanan internal negara tersebut dan mendukung rekonsiliasi regional. Upaya-upaya ini tidak hanya

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Bob Deen, *The EU in The South Caucasus Navigating A Geopolitical Labyrinth in Turmoil* (The Hague: Clingendael Institute, 2023), 52.

---

<sup>8</sup> Ibid., 54.

<sup>9</sup> Ibid., 55.

bertujuan meredakan dampak langsung dari perang, tetapi juga membangun fondasi perdamaian jangka panjang di kawasan Kaukasus Selatan. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai kerja sama Uni Eropa dengan Armenia dalam mewujudkan perdamaian pasca Perang Karabakh Kedua.

## KERANGKA DASAR TEORI

### Perspektif Pluralisme

Pluralisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang mengakui keberagaman aktor dalam hubungan internasional khususnya aktor non-negara dan melihat bahwa keberadaan aktor-aktor tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan internasional. Perspektif pluralisme dapat dijelaskan ke dalam dua pandangan yaitu pluralisme secara luas dan pluralisme secara sempit.

Secara luas pluralisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang meyakini keberagaman atau keberadaan dari banyak hal. Sebagai sebuah konsep deskriptif pluralisme dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk keberagaman antara lain keberagaman politik, keberagaman budaya, dan keberagaman moral. Sedangkan untuk pandangan pluralisme secara sempit pluralisme dapat dipahami sebagai sebuah teori yang menjelaskan distribusi dari *political power*. Teori ini mencoba menjelaskan bahwa distribusi *power* berada menyebar ke seluruh masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok elit atau pemerintah.

Selain pandangan yang telah dijelaskan di atas terdapat pula beberapa

asumsi yang dapat membantu menjelaskan pluralisme sebagai sebuah teori. Viotti dan Kauppi menjelaskan beberapa asumsi dasar yang mendukung pandangan pluralisme yaitu:

1. Aktor non-negara adalah entitas yang penting dan merupakan faktor penting dalam politik dunia.
2. Negara bukan merupakan aktor utama.
3. Menentang asumsi realisme bahwa negara adalah aktor rasional.
4. Mendukung agenda politik internasional yang lebih luas.<sup>10</sup>

Selanjutnya pluralisme juga berpandangan bahwa isu-isu sosial ekonomi merupakan isu yang lebih penting untuk dibahas dibandingkan hanya membahas isu tradisional seperti keamanan nasional. Berkembangnya isu-isu non tradisional sebagai sebuah isu yang penting terkait dengan berkembangnya jaringan trans-nasional yang dibentuk oleh interdependensi yang terjadi antar aktor negara dan aktor non-negara dalam sistem internasional.

### Teori Perdamaian

Dalam buku *Peace, War and Defense*, Galtung mengusulkan tiga pendekatan utama dalam pencapaian perdamaian, yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*.

Dalam artikel berjudul *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*, yang juga dimuat dalam *Peace, War and Defense*, Galtung menyatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory* (Boston: Allyn and Bacon, 1991), 199-200.

*“The mechanisms that peace is based on should be built into the structure and be present as a reservoir for the system itself to draw upon... More specifically, structures must be found that remove causes of wars and offer alternatives to war in situations where wars might occur.”*<sup>11</sup>

Galtung menekankan bahwa perdamaian harus menyasar transformasi terhadap akar konflik, mengubah pandangan-pandangan kontradiktif antar kelompok, serta memperkuat elemen-elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik ke dalam suatu formasi sosial-politik yang baru demi tercapainya *positive peace* (perdamaian positif).

Galtung membedakan perdamaian menjadi perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif didefinisikan sebagai ketiadaan kekerasan langsung atau fisik, seperti perang atau konflik bersenjata antar negara atau antarkelompok besar. Konsep ini dianggap sebagai tahap awal dalam proses menuju perdamaian, tetapi tidak cukup untuk menciptakan kondisi yang damai secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Sebaliknya, perdamaian positif mengacu pada ketiadaan kekerasan struktural dan kultural, serta mencakup kerja sama, keadilan sosial, pembangunan yang inklusif, dan koeksistensi budaya. Hal ini mencerminkan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar keadilan, kesetaraan,

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan sistemik. Oleh karena itu, menurut Galtung, *peacebuilding* menjadi kerangka utama dalam mewujudkan perdamaian sejati. *Peacebuilding* bukan sekadar penghentian konflik bersenjata, melainkan upaya aktif dan berkelanjutan untuk menciptakan struktur sosial-politik yang mendukung perdamaian positif secara jangka panjang.<sup>13</sup>

### **Level Analisis Sistem Internasional**

Level analisis sistem internasional merupakan pendekatan yang menyoroti dinamika dan interaksi antarnegara, organisasi internasional, serta aktor non-negara dalam kerangka struktur sistem global secara keseluruhan. Pada level ini, fokus utama terletak pada struktur kekuasaan global, peran aktor-aktor, serta dinamika yang memengaruhi hubungan antarnegara dalam sistem internasional.

Uni Eropa, sebagai *Intergovernmental Organization* (IGO), merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara anggotanya melalui perjanjian internasional untuk mencapai tujuan bersama. Uni Eropa memiliki badan hukum tersendiri yang terpisah dari negara-negara anggotanya dan berperan sebagai aktor penting dalam sistem internasional. Dalam konteks ini, Uni Eropa bertindak sebagai aktor eksternal yang berupaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Kaukasus Selatan, khususnya di Armenia pasca Perang Karabakh Kedua.

Melalui kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, Uni Eropa berperan aktif dalam proses *peacebuilding* di Armenia. Uni Eropa bekerja sama dengan

<sup>11</sup> Johan Galtung, *Peace, War and Defense* (Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1976), 297-298.

<sup>12</sup> Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace Research,” *Journal of Peace Research* 6, no. 3, (1969): 183.

<sup>13</sup> Ibid.

pemerintah Armenia dengan menekankan pendekatan diplomatik, bantuan kemanusiaan, serta dukungan internasional guna mendorong rekonsiliasi sosial dan pembangunan pascakonflik. Selain itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil Uni Eropa dipandu oleh norma-norma hukum internasional, yang meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan penyelesaian konflik secara damai.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunikan dari suatu pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna dari fenomena yang diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mencatat, menganalisis, menggambarkan, dan menginterpretasikan kondisi serta peristiwa yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk dan implementasi kerja sama antara Uni Eropa dan Armenia dalam mewujudkan perdamaian pasca Perang Karabakh Kedua.

Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, laporan lembaga internasional, liputan berita, serta situs web yang relevan dengan kerja sama antara Uni Eropa dan Armenia dalam upaya mewujudkan perdamaian pasca Perang Karabakh Kedua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui teknik ini, peneliti menghimpun informasi dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bentuk, strategi, dan implementasi kerja sama Uni Eropa dengan Armenia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kerjasama European Union Mission in Armenia (EUMA)***

Misi sipil merupakan salah satu instrumen dalam *Common Security and Defence Policy* (CSDP) yang bertujuan untuk mendukung pencegahan konflik, manajemen krisis, dan stabilisasi pascakonflik. Misi sipil biasanya melibatkan pengerahan personel sipil, seperti polisi, hakim, penasihat hukum, dan pakar sipil lainnya, guna memperkuat institusi mitra dan meningkatkan stabilitas di kawasan yang terdampak konflik. Keputusan Uni Eropa untuk mengerahkan misi sipil diambil atas permintaan negara mitra dan/atau berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional, kepentingan keamanan Uni Eropa, serta strategi keterlibatan regional yang berlaku.<sup>14</sup>



Gambar 1. *European Union Mission in Armenia (EUMA)*.

Sumber: European External Action Service, “EU Mission in Armenia (EUMA),” diakses 2 Maret 2025, [https://www.eeas.europa.eu/euma/eu-mission-armenia-euma\\_en](https://www.eeas.europa.eu/euma/eu-mission-armenia-euma_en).

Salah satu misi sipil yang dikerahkan Uni Eropa di Armenia adalah *European Union Mission in Armenia (EUMA)*. EUMA merupakan misi sipil non-eksekutif dan non-bersenjata yang diluncurkan di bawah kerangka *Common Security and Defence Policy (CSDP)*. EUMA menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Uni Eropa dalam memfasilitasi stabilitas dan perdamaian di kawasan Kaukasus Selatan, khususnya

dalam mendukung normalisasi hubungan antara Armenia dan Azerbaijan. Kehadiran EUMA bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses perdamaian yang difasilitasi oleh Uni Eropa.

Pembentukan EUMA merupakan respons atas permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Armenia pada Desember 2022 untuk penerjunan misi sipil penuh Uni Eropa. EUMA merupakan kelanjutan dari keberhasilan pelaksanaan *European Union Monitoring Capacity to Armenia (EUMCAP)*, yang telah aktif sejak 20 Oktober 2022 hingga 19 Desember 2022. EUMA secara resmi didirikan pada 23 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa (*EU Foreign Affairs Council*) dan mulai beroperasi pada 20 Februari 2023, bertepatan dengan pembukaan markas besarnya di Yeghegnadzor serta pencapaian kapasitas operasional awal.<sup>15</sup>

EUMA memiliki mandat awal selama dua tahun (20 Februari 2023 – 20 Februari 2025) dan pada 30 Januari 2025, Dewan Uni Eropa telah memutuskan untuk memperpanjang mandat EUMA untuk periode kedua dari 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2027. Wilayah operasi EUMA secara eksklusif berada di dalam wilayah Armenia, mencakup seluruh perbatasan dengan Azerbaijan, termasuk area Nakhchivan dan beberapa enklave Azerbaijan. Meskipun tidak termasuk dalam wilayah tanggung jawab formalnya, EUMA juga memantau pintu masuk menuju Koridor Lachin dari sisi Armenia.<sup>16</sup>

Struktur operasional EUMA terdiri atas

<sup>14</sup> European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management, “Civilian Crisis Management,” diakses 20 Mei 2025, <https://www.coe-civ.eu/the-coe/civilian-crisis-management>.

<sup>15</sup> European External Action Service, “EU Mission in Armenia (EUMA),” diakses 2 Maret 2025, [https://www.eeas.europa.eu/euma/eu-mission-armenia-euma\\_en](https://www.eeas.europa.eu/euma/eu-mission-armenia-euma_en).

<sup>16</sup> Ibid.

markas besar di Yeghegnadzor dan enam *Forward Operating Bases* (FOB) yang tersebar di Goris, Ijevan, Jermuk, Kapan, Martuni, dan Yeghegnadzor. EUMA juga memiliki kantor penghubung (*Liaison and Support office*) di Yerevan serta terhubung dengan Kantor Pusat Misi Sipil Uni Eropa (*EU Civilian Headquarters*) di Brussels melalui *European External Action Service* (EEAS). Komunikasi antara EUMA dan pemerintah Armenia serta Delegasi Uni Eropa untuk Armenia (*EU Delegation to Armenia*) dan Perwakilan Khusus Uni Eropa (*EU Special Representative*) dilakukan secara rutin demi menjaga koordinasi dan prinsip netralitas.<sup>17</sup>

Kepala Misi (*Head of Mission*) EUMA adalah Markus Ritter, seorang perwira polisi senior dengan pengalaman luas dalam misi sipil Uni Eropa, termasuk pernah menjabat sebagai Kepala Misi EUAM Irak dari tahun 2017 hingga 2019. Sebelum bergabung dengan EUMA, Markus Ritter menjabat sebagai Presiden Direktorat Kepolisian Federal Jerman (*President of the German Federal Police Directorate*) di Stuttgart. Pada mandat pertama, EUMA terdiri atas 209 personel, termasuk 165 staf internasional dan 44 staf lokal. Mandat kedua EUMA memperluas kapasitas menjadi 225 personel, yang terdiri atas 166 staf internasional dan 59 staf lokal. Sebagian besar pengamat sipil tak bersenjata berasal dari 25 negara anggota Uni Eropa, ditambah satu negara mitra, yakni Kanada.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> European External Action Service, "Q&A: EU Mission in Armenia (EUMA)," diakses 8 Mei 2025, [https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma\\_en?s=410283](https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma_en?s=410283).

<sup>18</sup> Ibid.

Berdasarkan *Council Decision* (CFSP) 2023/162 tertanggal 23 Januari 2023, EUMA memiliki tujuan strategis untuk mengurangi jumlah insiden di wilayah konflik dan perbatasan Armenia, menurunkan risiko bagi penduduk setempat, dan secara umum berkontribusi terhadap normalisasi hubungan Armenia dan Azerbaijan. Untuk mencapai tujuan tersebut, misi ini memiliki mandat sebagai berikut:

1. Mengamati dan melaporkan situasi keamanan di sepanjang sisi wilayah Armenia yang berbatasan secara internasional dengan Azerbaijan;
2. Berkontribusi terhadap peningkatan keamanan manusia di wilayah yang dilanda konflik di Armenia;
3. Mendukung pembangunan kepercayaan antara Armenia dan Azerbaijan.

### **Mengamati dan Melaporkan Situasi Keamanan di Sepanjang Perbatasan Armenia–Azerbaijan**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 *Council Decision* (CFSP) 2023/162 tanggal 23 Januari 2023 tentang *European Union mission in Armenia* (EUMA), EUMA memiliki mandat utama untuk melakukan pengamatan dan pelaporan terhadap situasi keamanan di wilayah perbatasan Armenia–Azerbaijan. Pengamatan tersebut dilaksanakan melalui patroli rutin serta pelaporan berkala mengenai kondisi di lapangan dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan konflik, guna memperoleh pemahaman yang rinci dan akurat terhadap dinamika keamanan di kawasan tersebut. Laporan EUMA bersifat terbatas dan ditujukan langsung kepada markas besar Uni Eropa di Brussels.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> European External Action Service, "Q&A: EU

Laporan oleh EUMA merupakan laporan terbatas yang ditujukan kepada Markas Besar Uni Eropa di Brussels.

Kegiatan pengamatan EUMA tidak hanya bersifat observasional, melainkan juga strategis. Pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai sasaran utama EUMA, yaitu memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah insiden di wilayah yang terdampak konflik dan di kawasan perbatasan Armenia, menurunkan tingkat risiko bagi penduduk sipil yang tinggal di sekitar perbatasan, serta mendukung proses normalisasi hubungan antara Armenia dan Azerbaijan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, EUMA menjalin koordinasi erat dengan otoritas Armenia, dan demi transparansi serta keamanan, misi ini juga memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Azerbaijan sebelum melakukan patroli.<sup>20</sup>



Gambar 2. Patroli EUMA di wilayah perbatasan Armenia–Azerbaijan

Sumber: European External Action Service, “Q&A: EU Mission in Armenia (EUMA),” diakses 20 Mei 2025,

---

Mission in Armenia (EUMA),” diakses 8 Mei 2025, [https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma\\_en?s=410283](https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma_en?s=410283).

<sup>20</sup> Ibid.

[https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma\\_en?s=410283](https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma_en?s=410283).

Wilayah operasi EUMA mencakup seluruh perbatasan Armenia dengan Azerbaijan, dengan cakupan patroli mingguan seluas sekitar 3.800 kilometer. Setiap hari, EUMA mengerahkan tiga hingga empat patroli dari enam *Forward Operating Bases* (FOB) yang tersebar di Goris, Ijevan, Jermuk, Kapan, Martuni, dan Yeghegnadzor. Sejak memulai tugasnya pada Februari 2023, EUMA telah meningkatkan jumlah patroli malam guna menjamin keamanan di waktu-waktu rawan. Namun, karena keterbatasan sumber daya, EUMA tidak selalu berada di lokasi saat insiden terjadi. Oleh karena itu, tim EUMA akan mengunjungi lokasi kejadian segera setelah kondisi keamanan memungkinkan.<sup>21</sup>

Sejak diluncurkan pada 20 Februari 2023, EUMA telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pelaksanaan mandat pemantauannya. Hingga akhir tahun 2024, misi ini telah melakukan lebih dari 4.000 patroli, dengan rata-rata jarak tempuh sekitar 3.800 kilometer setiap minggu. Dari jumlah tersebut, lebih dari 500 patroli merupakan patroli *Security Situational Awareness*, sementara lebih dari 900 lainnya merupakan patroli *Human Security*. Tingginya intensitas patroli mencerminkan tingginya tingkat keterlibatan dan komitmen Uni Eropa terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan perbatasan Armenia–Azerbaijan.

Sejak kehadiran EUMA, terjadi penurunan signifikan dalam frekuensi serangan dari pihak Azerbaijan terhadap wilayah Armenia. Selama periode 2023–2024, hanya tercatat tiga insiden kecil di

---

<sup>21</sup> Ibid.

perbatasan. Meskipun bersifat sipil dan tidak bersenjata, kehadiran EUMA memberikan dampak psikologis dan strategis yang kuat bagi pihak Armenia, khususnya dalam mengurangi kecemasan akan potensi serangan militer lanjutan. Dengan demikian, EUMA berperan dalam menciptakan ruang yang lebih aman bagi Armenia untuk memulihkan dan membangun kembali kapasitas pertahanannya.

### **Kontribusi terhadap Keamanan Manusia di Wilayah yang Terdampak Konflik di Armenia**

Selain melakukan pemantauan terhadap pergerakan militer, EUMA juga fokus pada aspek keamanan sipil dan dampak konflik terhadap masyarakat lokal di sisi Armenia dari perbatasan. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup keterlibatan langsung dengan masyarakat setempat melalui pelaksanaan misi keamanan manusia (*human security mission*). Dalam misi ini, para pengamat EUMA secara rutin mengunjungi permukiman di dekat perbatasan, berinteraksi dengan warga melalui penerjemah, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas.<sup>22</sup>

Melalui patroli ini, para pengamat EUMA secara rutin melakukan pertemuan dengan penduduk dan perwakilan masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi, memahami kondisi aktual di lapangan, serta melaporkan situasi keamanan setempat. Selain itu, para pengamat EUMA juga mengunjungi sekolah-sekolah di wilayah perbatasan sebagai bagian dari kegiatan diplomasi sipil, dimana para pengamat EUMA memperkenalkan misi, kegiatan,

serta nilai-nilai Uni Eropa yang menjadi pedoman bagi EUMA. Pendekatan ini telah membantu EUMA membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan EUMA dan Uni Eropa.

Salah satu contoh nyata dari kontribusi EUMA terhadap *human security* dapat ditemukan di Desa Nerkin Hand, yang terletak di wilayah Syunik, Armenia. Desa ini menghadapi tantangan keamanan yang unik akibat lokasinya yang strategis dan rawan, karena dikelilingi oleh pasukan Azerbaijan di tiga sisi. Pada tahap awal, desa ini tidak dapat diakses oleh para pengamat EUMA karena keberadaan pasukan penjaga perdamaian Rusia yang masih aktif di wilayah tersebut. Namun, setelah penarikan pasukan Rusia, EUMA mulai melakukan kunjungan rutin ke desa ini.

EUMA berperan sebagai pemantau sipil untuk menciptakan kepercayaan, mendeteksi eskalasi militer, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi warga sipil dan pengungsi yang terdampak. Namun, mandat EUMA terbatas—tidak bersenjata dan hanya memiliki kekuatan simbolik dan diplomatik. Lachin adalah satu-satunya jalur penghubung antara Nagorno-Karabakh dan Armenia. Pemantauan EUMA bertujuan mencegah pemblokiran oleh Azerbaijan, yang telah berdampak pada krisis kemanusiaan.

Dampak dari kehadiran EUMA melampaui aspek keamanan semata. Kehadiran para pengamat EUMA secara rutin telah membantu mengatasi isolasi yang dialami banyak masyarakat perbatasan, dengan penduduk melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, mulai

---

<sup>22</sup> Ibid.

dari pekerjaan pertanian hingga pendidikan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa keamanan manusia tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga pemulihan rasa normalitas dan partisipasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan positif ini menunjukkan bahwa kehadiran misi sipil internasional dapat menciptakan ruang yang lebih aman bagi masyarakat sipil, sekaligus memperkuat stabilitas sosial di kawasan perbatasan.

### **Mendukung Pembangunan Kepercayaan antara Armenia dan Azerbaijan**

Sebagai misi netral, EUMA memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara Armenia dan Azerbaijan pasca Perang Karabakh Kedua. Patroli reguler yang dilaksanakan membantu mengurangi risiko salah persepsi atau eskalasi mendadak di perbatasan. Kehadiran EUMA menciptakan rasa aman bagi komunitas lokal dan mendorong proses dialog diplomatik bebas dari tekanan militer. Misi ini juga menyediakan mekanisme komunikasi darurat untuk menangani insiden kecil secara damai, sebelum berkembang menjadi konflik berskala besar.

EUMA turut berkontribusi dalam proses delimitasi dan demarkasi perbatasan dengan menyediakan data objektif dari lapangan yang dapat digunakan oleh kedua negara serta komunitas internasional. Informasi ini penting untuk meningkatkan transparansi, memperkecil potensi kesalahpahaman teknis, dan membangun fondasi kepercayaan dalam negosiasi. Walaupun bersifat non-eksekutif dan tidak memiliki mandat militer, kehadiran

EUMA dianggap sebagai langkah strategis Uni Eropa dalam mendukung penyelesaian damai jangka panjang serta mencegah kekerasan di kawasan.

Dalam konteks mendukung proses delimitasi dan demarkasi perbatasan, EUMA memainkan peran strategis melalui pengumpulan dan penyediaan data lapangan yang objektif. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses negosiasi antara kedua negara dan turut disampaikan kepada komunitas internasional guna meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi perselisihan teknis.

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, sebelas pertemuan Komisi Penetapan Batas Negara antara Azerbaijan dan Armenia telah dilaksanakan, dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Azerbaijan, Shahin Mustafayev, dan Wakil Perdana Menteri Armenia, Mher Grigoryan. Lima dari pertemuan tersebut berlangsung pada tahun 2024, yaitu pada tanggal 31 Januari, 7 Maret, 19 April, 15 Mei, dan 1 November.

Langkah-langkah signifikan dicapai dalam pertemuan kedelapan dan kesembilan. Pada pertemuan kedelapan (19 April 2024), kedua pihak sepakat untuk mendasarkan proses delimitasi perbatasan pada Deklarasi Alma-Ata tahun 1991. Armenia menyetujui pengembalian empat desa di Distrik Gazakh kepada Azerbaijan, yaitu Ashagi Eskipara, Baghanis Ayrum, Kheyrimli, dan Gizilhajili. Desa-desa ini telah diduduki oleh Armenia sejak awal 1990-an, dan permintaan pengembaliannya telah menjadi poin penting dalam negosiasi Azerbaijan.

Pertemuan kesembilan pada 15 Mei 2024 menghasilkan kesepakatan mengenai penetapan garis batas di bagian paling utara wilayah perbatasan. Segmen yang

disepakati meliputi: Baganis (Armenia)–Baganis Ayrum (Azerbaijan); Voskepar (Armenia)–Ashagi Askipara (Azerbaijan); Kirants (Armenia)–Kheyrimli (Azerbaijan); dan Berkaber (Armenia)–Gizilhajili (Azerbaijan). Hingga 6 Mei 2024, sebanyak 40 pilar perbatasan telah dipasang sebagai simbol kesepakatan awal delimitasi di wilayah tersebut.

Sebagai kelanjutan dari kemajuan tersebut, pada 30 Agustus 2024, kedua negara menandatangani Peraturan tentang Kegiatan Bersama Komisi Penetapan Batas Negara dan Keamanan Perbatasan antara Armenia dan Azerbaijan. Dokumen ini telah disetujui oleh Pemerintah Armenia dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Armenia. Parlemen Armenia meratifikasinya pada 23 Oktober 2024, dan Presiden Armenia, Vahagn Khachaturyan, menandatangani menjadi undang-undang pada hari berikutnya. Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, juga meratifikasi dokumen tersebut melalui dekrit presiden pada 25 Oktober 2024.

Penandatanganan dokumen hukum bilateral ini mencerminkan pencapaian penting dalam hubungan Armenia dan Azerbaijan, karena merupakan kesepakatan resmi pertama yang dihasilkan melalui negosiasi langsung pascakonflik. Akibatnya, segmen perbatasan sepanjang 12,7 kilometer kini diakui bersama oleh kedua negara, menandai tonggak historis dalam proses delimitasi dan demarkasi yang didukung penuh oleh misi EUMA.

Pada tahun 2024, sejumlah perkembangan positif diamati dalam proses negosiasi antara Azerbaijan dan

Armenia. Salah satu ciri utama dari fase ini adalah pembentukan format negosiasi bilateral langsung antara kedua negara. Format ini menegaskan pentingnya dialog langsung yang berkelanjutan tanpa kehadiran perantara tradisional, serta memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk mencapai hasil konkret terkait isu-isu utama.

Pertemuan tingkat tinggi antara para pemimpin Armenia dan Azerbaijan, yaitu Perdana Menteri Nikol Pashinyan dan Presiden Ilham Aliyev, terus berlangsung sepanjang tahun 2024. Pada tanggal 17 Februari, atas inisiatif Kanselir Jerman Olaf Scholz, mereka mengadakan pertemuan bersama di sela-sela Konferensi Keamanan Munich. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kanselir Jerman, Presiden Azerbaijan, dan Perdana Menteri Armenia. Selain itu, pada 24 Oktober, sebuah pertemuan tak terjadwal antara kedua pemimpin dilaksanakan di sela-sela KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu bilateral, termasuk perjanjian damai, delimitasi dan demarkasi perbatasan, serta isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama.

Sebagai bagian dari upaya diplomatik yang berkelanjutan, menteri luar negeri kedua negara, Jeyhun Bayramov dari Azerbaijan dan Ararat Mirzoyan dari Armenia, diberi mandat untuk menyelesaikan rancangan Perjanjian tentang Pembentukan Perdamaian dan Hubungan Antarnegara antara Azerbaijan dan Armenia. Sepanjang tahun 2024, para menteri ini bertemu dalam beberapa kesempatan.

Pertemuan penting lainnya berlangsung di Almaty pada 10–11 Mei 2024, di mana para menteri membahas pasal-pasal

rancangan perjanjian damai secara lebih mendalam. Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang belum terselesaikan, mereka sepakat untuk melanjutkan negosiasi mengenai isu-isu terbuka.

Menurut pernyataan terbaru dari Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, kontak diplomatik dengan Armenia tetap berkelanjutan dalam berbagai bidang pascakonflik. Pertemuan rutin terus dilakukan, khususnya terkait pembahasan rancangan perjanjian damai. Hingga saat ini, 15 dari 17 pasal dalam rancangan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, sementara dua pasal lainnya masih dalam tahap perundingan. Bayramov juga menyoroti isu tambahan yang menjadi perhatian Azerbaijan, yakni terkait klaim teritorial yang masih termuat dalam Konstitusi Armenia serta sejumlah tindakan hukum normatif nasional lainnya. Azerbaijan berharap Armenia akan mengambil langkah-langkah praktis untuk menanggapi kekhawatiran tersebut.

Presiden Ilham Aliyev dalam wawancaranya bersama Dmitry Kiselev, Direktur Jenderal Kantor Berita Internasional Rossiya Segodnya, menjelaskan bahwa dua pasal yang belum terselesaikan berkaitan dengan: pertama, kesepakatan untuk menahan diri dari mengajukan gugatan hukum internasional satu sama lain; dan kedua, larangan terhadap kehadiran perwakilan negara ketiga di sepanjang perbatasan Armenia-Azerbaijan. Poin terakhir ini berkaitan erat dengan peluncuran EUMA pada 20 Februari 2023, yang diberi mandat selama dua tahun dan memunculkan kekhawatiran dari pihak Azerbaijan.

Presiden Aliyev juga menekankan

dua syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pihak Armenia. Syarat pertama berkaitan dengan Konstitusi Armenia yang masih mengandung referensi pada Deklarasi Kemerdekaan, yang memuat klaim terhadap wilayah Azerbaijan, khususnya bekas Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh. Ia menegaskan bahwa perubahan konstitusi tersebut bukan merupakan tuntutan sepihak, melainkan kebutuhan objektif demi terciptanya perdamaian jangka panjang. Syarat kedua adalah pembubaran resmi *OSCE Minsk Group*, sebuah lembaga yang secara de facto tidak lagi aktif, namun secara formal masih eksis. Aliyev menilai bahwa keengganan Armenia untuk membubarkan kelompok ini menunjukkan adanya agenda tersembunyi yang masih dipertahankan oleh pihak-pihak tertentu di Armenia. Dengan tercapainya kesepakatan pada dua pasal terakhir dalam rancangan perjanjian serta pemenuhan dua syarat tersebut, Presiden Aliyev menyatakan bahwa tidak ada lagi hambatan untuk penandatanganan perjanjian damai yang komprehensif antara Armenia dan Azerbaijan.

Penerapan teori perdamaian dari Johan Galtung dalam kerja sama Uni Eropa dengan Armenia untuk mewujudkan perdamaian melalui *European Union Mission in Armenia* (EUMA) tercermin dalam upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan pasca perang Karabakh kedua. Menurut Galtung, perdamaian menekankan perubahan mendasar dalam masyarakat dengan membangun institusi yang adil, memenuhi kebutuhan komunitas, dan mengatasi akar penyebab konflik, bukan hanya menghentikan kekerasan secara langsung (*negative peace*), tetapi juga membangun kepercayaan, keadilan, dan struktur sosial yang mendukung perdamaian (*positive peace*).

*Negative peace* menurut Johan Galtung pada kerja sama Uni Eropa dengan Armenia melalui *European Union Mission in Armenia* (EUMA) terlihat dari upaya menghentikan kekerasan langsung dan menjaga stabilitas pasca perang Karabakh kedua. EUMA berperan sebagai pemantau dan penangkal lunak (*soft deterrent*) di wilayah perbatasan Armenia, memastikan tidak terjadi lagi serangan bersenjata atau pelanggaran gencatan senjata, meski belum menyelesaikan ketidakadilan struktural. Dengan kata lain, EUMA membantu menciptakan kondisi tanpa perang atau kekerasan terbuka (*negative peace*), namun belum sepenuhnya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan adil (*positive peace*) seperti yang diidealkan Galtung. EUMA menjalankan mandat ini dengan melakukan patroli, observasi, pelaporan situasi di perbatasan, serta membangun kepercayaan antara Armenia dan Azerbaijan, sehingga mendukung stabilitas, keamanan manusia, dan transformasi sosial-politik yang sejalan dengan prinsip *positive peace* Galtung.

## **PENUTUP**

Kerja sama Uni Eropa dengan Armenia untuk mewujudkan perdamaian pasca Perang Karabakh Kedua diwujudkan melalui pembentukan *European Union Mission in Armenia* (EUMA), sebuah misi sipil non-bersenjata di bawah kerangka *Common Security and Defence Policy* (CSDP). Diluncurkan atas permintaan resmi pemerintah Armenia pada Desember 2022, EUMA mulai beroperasi pada 20 Februari 2023 dan bertujuan mendukung stabilitas serta proses normalisasi

hubungan antara Armenia dan Azerbaijan. Misi ini memiliki mandat untuk mengamati dan melaporkan situasi keamanan di sisi Armenia dari perbatasan, melindungi penduduk sipil, serta membangun kepercayaan antara kedua negara. Operasional EUMA meliputi patroli harian dari enam pangkalan di wilayah perbatasan, dengan cakupan wilayah sekitar 3.800 kilometer setiap minggu. Hingga akhir 2024, EUMA telah melaksanakan lebih dari 4.000 patroli, termasuk patroli keamanan dan patroli keamanan manusia, serta menjalin komunikasi langsung dengan komunitas lokal untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap misi Uni Eropa.

Kehadiran EUMA terbukti efektif dalam menurunkan frekuensi insiden kekerasan di perbatasan, memberikan rasa aman bagi warga sipil Armenia, serta menyediakan ruang yang stabil bagi rekonstruksi dan proses diplomasi. Selain itu, EUMA turut berperan penting dalam mendukung proses delimitasi dan demarkasi perbatasan antara Armenia dan Azerbaijan dengan menyediakan data lapangan yang objektif dan dapat digunakan dalam negosiasi bilateral. Hasilnya, Armenia dan Azerbaijan telah menyepakati pengembalian empat desa di Distrik Gazakh dan mengakui segmen perbatasan sepanjang 12,7 kilometer secara bersama-sama. Progres ini dikukuhkan melalui penandatanganan Peraturan tentang Kegiatan Bersama Komisi Penetapan Batas Negara pada Agustus 2024, yang menjadi kesepakatan bilateral pascakonflik pertama antar kedua negara. Meski menghadapi tantangan diplomatik, keberadaan EUMA tetap menjadi instrumen strategis Uni Eropa dalam mendorong proses perdamaian, membangun kepercayaan, dan mencegah kembalinya konflik bersenjata di kawasan

Kaukasus Selatan.

Penerapan teori perdamaian dari Johan Galtung dalam kerja sama Uni Eropa dengan Armenia untuk mewujudkan perdamaian melalui *European Union Mission in Armenia* (EUMA) tercermin dalam upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan pasca perang Karabakh kedua. Menurut Galtung, perdamaian menekankan perubahan mendasar dalam masyarakat dengan membangun institusi yang adil, memenuhi kebutuhan komunitas, dan mengatasi akar penyebab konflik, bukan hanya menghentikan kekerasan secara langsung (*negative peace*), tetapi juga membangun kepercayaan, keadilan, dan struktur sosial yang mendukung perdamaian (*positive peace*).

Dengan demikian, melalui kombinasi mediasi diplomatik, misi pemantauan, bantuan kemanusiaan, dukungan finansial, dan dialog strategis, Uni Eropa membangun kemitraan menyeluruh dengan Armenia untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di kawasan pascakonflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bob Deen, *The EU in The South Caucasus Navigating A Geopolitical Labyrinth in Turmoil* (The Hague: Clingendael Institute, 2023), 52.

Davor Boban, "The Failure of The Nagorno-Karabakh Conflict Resolution: Shortcomings of Facilitative Mediation or an Unsuitable Mediator?," *Croatian Political Science Review* 60, no. 2 (2023): 76.

European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management, "Civilian Crisis Management," diakses 20 Mei

2025, <https://www.coe-civ.eu/the-coe/civilian-crisis-managment>.

European External Action Service, "EU Mission in Armenia (EUMA)," diakses 2 Maret 2025, [https://www.eeas.europa.eu/euma/eu-mission-armenia-euma\\_en](https://www.eeas.europa.eu/euma/eu-mission-armenia-euma_en).

European External Action Service, "Q&A: EU Mission in Armenia (EUMA)," diakses 8 Mei 2025, [https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma\\_en?s=410283](https://www.eeas.europa.eu/euma/qa-eu-mission-armenia-euma_en?s=410283).

European Union, "Aims and Values," diakses 8 Mei 2025, [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values\\_en](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_en).

Fitri Handayani, "Perdamaian dalam Masyarakat Global," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 66.

Johan Galtung, *Peace, War and Defense* (Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1976), 297-298.

Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3, (1969): 183.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory* (Boston: Allyn and Bacon, 1991), 199-200.